LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN NOVEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 9 Desember 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 94,34 %

b. Keuangan = 18.481.344.809 (89,07%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	9.820.000			0		

1	Evaluasi Pelaksanaan PUG Kab/Kota	9.820.000	100	0	0	(100)	proses perumusan indikator penilaian baru evaluasi APE
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	427.725.000			391.632.000		
1	Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan	427.725.000	100	97,11	391.632.000	(2,89)	Penyesuaian jadwal anggota dewan
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	29.390.000			16.177.000		
1	Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kabupaten/Kota	28.940.000	100	90	16.177.000	(10)	koordinasi dengan instansi terkait untuk implementasi atas hasil pilot project di kab Wonosobo
2	Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota	450.000	100	0	0	(100)	menunggu hasil pelaksanaan pendampingan pilot project TPK2D di wonosobo pada bulan Desember
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	4	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	5	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan November terdapat 3 kegiatan yang mengalami deviasi fisik negatif antara lain :

1. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Evaluasi Pelaksanaan PUG Kab/Kota;
2. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan;
3. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kabupaten/Kota, dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota;
4. Penyusunan RAD Dalduk KB masih dalam tahap pembahasan (draft) (Dalduk KB)
5. Anggaran DAK NF Perlindungan Perempuan dan Anak terkait layanan belum dapat terserap optimal (seksi PP dan PA)
6. Penyusunan 3 Rapergub (RAD Perlindungan Anak, Rapergub Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak, Rapergub Juklak Perda 4 2022) masih dalam tahap pembahasan (seksi PA)
7. Input data pada aplikasi SIGA belum bisa 100% keterisiannya (Seksi Datin)

Upaya

1. Koordinasi dengan tim penyusun RAD Dalduk KB (Dalduk KB)
2. Anggaran DAK NF Perlindungan Perempuan dan Anak akann dioptimalkan melalui penjangkauan kasus (seksi PP dan PA)
3. Koordinasi dengan tim penyusun Rapergub Perlindungan Anak (seksi PA)
4. Koordinasi dengan kab/kota untuk input data di aplikasi SIGA (seksi Datin)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Pendampingan standarisasi Puspaga (seksi PHA)
2. Peringatan Hari Ibu di Bengkulu (seksi KB)
3. Peningkatan kapasitas bagi pendamping perempuan korban bencana tingkat desa (seksi PP)
4. Pendampingan dan Konsultasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (seksi PP)
5. Lomba PPEP di Semarang (seksi KHP)
6. Seminar Hari Ibu di Semarang (seksi KHP)
7. Monev PPEP (seksi KHP)
8. Evaluasi Pelaksanaan PUG kab/kota (seksi KHP)
9. Penyusunan Draft RAD (seksi KHP)
10. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota (seksi KHP)
11. Monev pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA (seksi PA)
12. Peningkatan wawasan tentang kebijakan Perlindungan Anak (seksi PA)
13. Maintenance aplikasi e-kekerasan Jateng (seksi Datin)
14. Finalisasi penyusunan dokumen profil kependudukan, PUG, PUHA (seksi Datin)
15. Talk Show Perempuan sebagai Ibu Bangsa dalam rangka PHI (seksi Parmas)
16. HUT DWP Tahun 2022 (seksi Parmas)
17. Rapat Paripurna BKOW (seksi Parmas)
18. Pemeliharaan gedung rumah dinas puspowarno (UK)
19. Monev UPPKA dan Tribina (seksi KS)

20. Laporan Triwulanan dan akhir tahun (Keuangan)

PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. SPSE pengadaan langsung maupun tidak langsung dan PD3N Siera harus diinput setiap bulan;
8. Pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta harus diupayakan melalui E-Blangkon (mamin dan ATK).

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan November 2022, sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi Fisik (%)
1	Dinas Perempuan dan Anak	91.30	94.34	89.07	3.04
2	Sekretariat	89.91	93.23	88.23	3.32
3	Bidang KHPP	94.62	95.68	86.50	1.06
4	Bidang PHPA	95.95	97.49	95.38	1.54
5	Bidang KB KIE	97.10	97.89	97.49	0.79
6	Bidang DALDUK KS	86.67	99.37	87.51	12.71
7	Bidang Data Parmas	74.56	85.60	84.08	11.04

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan November 2022, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 9 Desember 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEREMPUAN DAN ANAK

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001